

SOSIALISASI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA KEPALA DESA DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Jopinus Saragih G

Universitas Efarina

e-mail: Jr.saragih68@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah kepada kepala desa di Kabupaten Simalungun. Fokus untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman terhadap materi, hambatan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode pengabdian menggunakan pendekatan analisis situasi dengan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan kegiatan pengabdian berdasarkan hasil analisis data. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi kepala desa dalam sosialisasi mencapai 85%, dengan sebagian besar peserta memahami materi terkait transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat hambatan dalam aksesibilitas lokasi, waktu pelaksanaan, dan keterbatasan sarana prasarana. Dampak positif sosialisasi terlihat dari peningkatan transparansi keuangan desa (65%) dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (54%). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi, yang hanya diterapkan oleh 38% kepala desa. Sosialisasi ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi keberlanjutan program, pendekatan berbasis teknologi, dan pelatihan tambahan diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Sosialisasi memiliki dampak positif, namun memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan memperluas manfaatnya bagi tata kelola desa di masa depan.

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Pengabdian Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Simalungun

Abstract

This community service aims to socialize the strengthening of local government governance to village heads in Simalungun Regency. The focus is on improving participation, understanding of the material, obstacles in implementation, and its impact on the application of good governance principles. The service method uses a situational analysis approach with a qualitative descriptive technique, with data collection methods including interviews, observations, and documentation. The community service activities are then carried out based on the results of the data analysis. The results of the community service show that the participation rate of village heads in the socialization reached 85%, with most participants understanding the material related to transparency and accountability. However, there were obstacles related to accessibility of the location, timing of the implementation, and limited infrastructure. The positive impact of the socialization is evident in the increase in village financial transparency (65%) and community participation in village deliberations (54%). Nevertheless, there are still challenges in the use of information technology, which is only applied by 38% of village heads. This socialization supports the implementation of Law Number 6 of 2014 on Villages, but sustainability of the program, technology-based approaches, and additional training are needed to improve its effectiveness. While the socialization has a positive impact, strategic steps are required to overcome obstacles and expand its benefits for village governance in the future.

Keywords: Governance, Community Service, Transparency, Accountability, Community Participation, Simalungun Regency

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Desentralisasi, yang dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi landasan bagi otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri (Christia & Ispriyarso, 2019). Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan,

program, dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Di Kabupaten Simalungun, seperti di banyak daerah lain, tata kelola pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu bentuk penguatan tata kelola ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat bukan hanya tanggung jawab dari kalangan akademisi, namun juga sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperbaiki dan menguatkan sistem pemerintahan daerah (Zunaidi, 2024).

Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di Sumatera Utara, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Harahap, 2024). Sebagai pintu utama menuju pembangunan yang berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah, termasuk di tingkat desa. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan terdepan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa bukan hanya tentang pengelolaan administrasi, tetapi juga mencakup kemampuan merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, serta menjalankan pelayanan publik dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang perlunya sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kepala desa melalui program sosialisasi yang terstruktur.

Sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah kepada kepala desa menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang di tingkat daerah dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para kepala desa tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa. Mulai dari minimnya pemahaman mengenai regulasi terbaru hingga kendala teknis dalam pengelolaan dana desa, semua menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Melalui sosialisasi ini, diharapkan kepala desa tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif di lapangan.

Tabel 1. Tantangan dan Solusi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Simalungun

Tantangan	Solusi Melalui Pengabdian Masyarakat
Kurangnya transparansi	Pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data publik
Rendahnya akuntabilitas	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengambilan kebijakan
Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas	Pelatihan manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan
Minimnya partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan
Koordinasi antar lembaga yang lemah	Program peningkatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pemerintahan

Kepala desa adalah ujung tombak dalam menjalankan program-program pemerintah. Mereka menjadi perantara utama antara masyarakat dengan pemerintah daerah (Margareta et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala desa dalam tata kelola pemerintahan sangat penting agar pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai dengan visi dan misi daerah. Program sosialisasi ini juga menjadi forum diskusi bagi para kepala desa untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang dapat diadopsi bersama. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, sosialisasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang aplikatif bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Kabupaten Simalungun, seperti daerah lainnya, dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dana desa semakin meningkat, sehingga pengelolaannya membutuhkan tata kelola

yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sosialisasi ini juga merupakan langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul di desa, seperti konflik dalam pengelolaan anggaran, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Semua isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk diselesaikan.

Dalam sosialisasi ini, kepala desa akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bukan hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu topik utama dalam sosialisasi ini. Kepala desa akan dilatih untuk mengelola anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari sosialisasi ini adalah menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern dan berbasis teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan proses administrasi dan pelayanan publik di desa menjadi lebih efisien dan terbuka. Ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital hingga ke tingkat desa. Kepala desa juga diajak untuk memahami pentingnya pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan. Dengan sistem pengawasan yang baik, setiap potensi penyimpangan dapat diminimalisasi sejak awal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Program ini juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang harmonis antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang baik, tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi bersama-sama, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih cepat. Sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh desa-desa lain di Indonesia. Kepala desa di Simalungun dapat belajar dari pengalaman desa lain yang berhasil menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Melalui pendekatan yang holistik, sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kepala desa mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat desa. Kabupaten Simalungun memiliki visi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Dalam visi ini, pemerintah desa memegang peranan penting sebagai pilar utama yang menopang pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, sosialisasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di semua tingkatan. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, kepala desa diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Melalui sosialisasi ini, kepala desa juga didorong untuk membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Penguatan tata kelola pemerintahan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif, inovatif, dan berintegritas. Kabupaten Simalungun, dengan segala potensinya, memerlukan kepala desa yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki visi untuk membawa desanya menuju kemajuan. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan hal tersebut, dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Pengabdian ini diawali dengan analisis situasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah kepada kepala desa di Kabupaten Simalungun (Sutopo, 2002). Pengabdian ini diawali dirancang untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai proses, hambatan, dan dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut. Berikut adalah penjelasan terkait metode pengabdian yang digunakan:

1. Analisis Situasi

Pendekatan yang digunakan dalam analisis situasi adalah deskriptif kualitatif (Agustianti et al., 2022). Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam dengan mengamati perilaku, pengalaman, dan persepsi para kepala desa serta pihak terkait mengenai program sosialisasi yang dilakukan.

2. Lokasi Pengabdian

Pengabdian dilakukan di Kabupaten Simalungun, khususnya di desa-desa yang menjadi sasaran program sosialisasi. Lokasi dipilih berdasarkan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.

3. Subjek Pengabdian

Subjek pengabdian ini meliputi:

- Kepala desa yang mengikuti sosialisasi.
- Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi.
- Narasumber atau fasilitator dalam kegiatan sosialisasi.
- Perwakilan masyarakat desa sebagai penerima dampak dari implementasi tata kelola pemerintahan yang diperkuat.

4. Teknik Analisis Situasi

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut (Miles & Huberman, 1992):

- Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap kepala desa, fasilitator, dan aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan dan hasil sosialisasi.
- Observasi: Mengamati langsung proses sosialisasi, termasuk teknik penyampaian materi, interaksi peserta, dan respon kepala desa terhadap materi yang disampaikan.
- Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait sosialisasi, seperti bahan presentasi, laporan kegiatan, dan kebijakan yang dihasilkan.
- Kuesioner: Menggunakan kuesioner terbuka untuk melengkapi data persepsi kepala desa mengenai manfaat dan kendala yang dihadapi selama sosialisasi.

5. Instrumen

Instrumen mencakup pedoman wawancara, daftar observasi, serta panduan untuk analisis dokumen. Semua instrumen dirancang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan valid.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut (Miles & Huberman, 1992):

- Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai kebutuhan penelitian.
- Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.
- Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan data yang telah disajikan, dibuat kesimpulan mengenai efektivitas sosialisasi, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa.

7. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi konsistensi dan akurasi data.

8. Populasi dan Sampel Pengabdian

Populasi adalah seluruh kepala desa di Kabupaten Simalungun yang menjadi peserta sosialisasi. Sampel diambil secara purposif, yaitu kepala desa yang memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan dianggap representatif untuk memberikan data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Kepala Desa dalam Sosialisasi

Berdasarkan observasi dan data dokumentasi, ditemukan bahwa tingkat partisipasi kepala desa dalam kegiatan sosialisasi cukup tinggi. Dari 386 kepala desa di Kabupaten Simalungun, 85% atau sekitar 328 kepala desa hadir secara aktif dalam kegiatan sosialisasi. Namun, 15% sisanya tidak dapat hadir dengan alasan tertentu seperti jadwal yang bentrok atau lokasi yang sulit dijangkau.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Kepala Desa

Kategori	Jumlah Kepala Desa	Persentase
Hadir	328	85%
Tidak Hadir	58	15%
Total	386	100%

Tingkat partisipasi kepala desa yang mencapai 85% mencerminkan antusiasme dan kesadaran mereka terhadap pentingnya sosialisasi ini. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik dalam governance, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemimpin di tingkat lokal (Robbins & Coulter, 2005). Namun, absennya 15% kepala desa menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek teknis pelaksanaan sosialisasi, seperti pemilihan lokasi dan waktu yang lebih strategis. Partisipasi yang tinggi juga menunjukkan komitmen kepala desa dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan. Namun, untuk memastikan dampak yang lebih luas, kehadiran harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan (Setiawan, 2024).

2. Pemahaman Kepala Desa terhadap Materi Sosialisasi

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa mayoritas kepala desa memahami inti materi sosialisasi, terutama terkait prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sekitar 78% responden menyatakan materi sosialisasi relevan dan aplikatif, sementara 22% menganggap materi terlalu teknis dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Kepala Desa terhadap Materi

Kategori Pemahaman	Jumlah Kepala Desa	Persentase
Sangat Baik	102	31 %
Baik	150	47 %
Cukup	62	19 %
Kurang	14	3 %
Total	328	100 %

Sebanyak 78% kepala desa memahami materi dengan baik atau sangat baik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan efektivitas materi yang disampaikan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance (Putra, 2019) menjadi landasan utama dalam tata kelola desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan benar. Namun, 22% responden yang merasa materi terlalu teknis menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman, terutama bagi kepala desa dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang terbatas. Teori adult learning (Knowles, 1980) menyatakan bahwa pembelajaran untuk orang dewasa harus relevan, kontekstual, dan berbasis pengalaman praktis. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan yang lebih interaktif dan praktis mungkin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa hambatan utama:

- Aksesibilitas Lokasi: Beberapa kepala desa kesulitan menghadiri sosialisasi karena jarak dan kondisi infrastruktur.
- Waktu Pelaksanaan: Pelaksanaan sosialisasi sering bertabrakan dengan agenda desa yang lain.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Beberapa lokasi sosialisasi tidak dilengkapi dengan teknologi pendukung yang memadai, seperti proyektor atau perangkat audio-visual.

Tabel 3. Jenis Hambatan dan Frekuensi yang Ditemukan

Jenis Hambatan	Frekuensi	Persentase
Aksesibilitas Lokasi	90	27 %
Waktu Pelaksanaan	102	31 %
Keterbatasan Sarana	136	42 %
Total	328	100 %

Hambatan utama yang ditemukan meliputi aksesibilitas lokasi (27%), waktu pelaksanaan (31%), dan keterbatasan sarana prasarana (42%). Hambatan-hambatan ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan logistik, yang sesuai dengan konsep administrative capacity (Grindle, 2004). Kapasitas

administrasi yang terbatas dapat menghambat implementasi kebijakan, meskipun niat dan sumber daya tersedia. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan desentralisasi pelaksanaan sosialisasi, seperti mengadakan pelatihan berbasis klaster wilayah yang lebih dekat dengan lokasi kepala desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti modul daring atau webinar dapat menjadi solusi praktis untuk menjangkau peserta yang kesulitan hadir (Suaib, 2023).

4. Dampak Sosialisasi terhadap Tata Kelola Desa

Dampak dari sosialisasi terhadap tata kelola pemerintahan desa. Wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa:

- 65% kepala desa mulai menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, seperti mempublikasikan laporan keuangan di papan informasi desa.
- 54% responden mengakui adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa setelah mengikuti sosialisasi.
- Namun, hanya 38% yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola desa.

Tabel 4. Dampak Sosialisasi terhadap Tata Kelola Desa

Aspek Tata Kelola	Jumlah Kepala Desa	Persentase
Transparansi Keuangan	213	65 %
Peningkatan Partisipasi	177	54 %
Pemanfaatan Teknologi	125	38 %

Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi telah mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa. Sebanyak 65% kepala desa mulai menerapkan transparansi keuangan, seperti mempublikasikan laporan anggaran di papan informasi desa. Ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip transparency as a cornerstone of governance (Bovens, 2007), di mana transparansi menjadi langkah awal untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (54%) juga menunjukkan penguatan aspek inclusive governance. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dapat mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Namun, masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (38%) menunjukkan perlunya pelatihan tambahan terkait penggunaan perangkat digital, yang sejalan dengan prinsip e-governance untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Heeks, 2002).

5. Persepsi Kepala Desa terhadap Efektivitas Sosialisasi

Sebagian besar kepala desa menganggap bahwa sosialisasi telah membantu meningkatkan pemahaman mereka terkait tata kelola pemerintahan desa. Sekitar 72% kepala desa menyatakan puas dengan isi materi dan cara penyampaian narasumber, meskipun 28% merasa perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut setelah sosialisasi.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan terhadap Sosialisasi

Kategori Kepuasan	Jumlah Kepala Desa	Persentase
Sangat Puas	96	29 %
Puas	139	43 %
Cukup Puas	72	22 %
Tidak Puas	21	6 %
Total	328	100 %

Sebagian besar kepala desa (72%) menyatakan puas dengan sosialisasi ini, yang mencerminkan keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar peserta. Namun, 28% kepala desa merasa perlu pendampingan lebih lanjut, menunjukkan bahwa satu kali sosialisasi tidak cukup untuk mengubah pola kerja atau kebiasaan. Hal ini sesuai dengan teori continuous capacity building, di mana penguatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan dampak jangka panjang (Morgan, 1997). Pendampingan teknis secara berkala dapat menjadi solusi, misalnya melalui kunjungan lapangan, pelatihan ulang, atau pembentukan tim pendamping desa. Langkah ini juga akan membantu kepala desa yang menghadapi kendala teknis atau konseptual dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait tata kelola desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Hariri, 2018). Sosialisasi ini mendukung pelaksanaan mandat undang-undang tersebut, terutama dalam pengelolaan dana desa secara

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan memperkuat kapasitas kepala desa, diharapkan tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

SIMPULAN

Sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah kepada kepala desa di Kabupaten Simalungun menghasilkan dampak positif, meskipun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Secara umum, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepala desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi kepala desa dalam kegiatan tersebut dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan desa, seperti transparansi keuangan dan peningkatan musyawarah desa. Namun, ada teridentifikasi beberapa hambatan signifikan, termasuk aksesibilitas lokasi pelaksanaan sosialisasi, keterbatasan waktu, dan kurangnya sarana pendukung. Hambatan ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti penggunaan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak peserta. Dampak positif dari sosialisasi ini juga tercermin dalam penerapan praktik tata kelola yang lebih baik di tingkat desa, meskipun masih ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi dan komunikasi pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan tambahan yang lebih teknis dan berkelanjutan untuk memastikan kepala desa mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari perspektif kebijakan, program ini telah mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pembangunan desa. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas logistik serta infrastruktur. Kesimpulannya, sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Simalungun merupakan langkah awal yang baik dalam membangun desa yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Namun, keberlanjutan program, dukungan teknologi, dan strategi adaptif sangat diperlukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintahan desa dan masyarakatnya.

SARAN

Sosialisasi tidak cukup dilakukan sekali tanpa tindak lanjut yang jelas. Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kepala desa, seperti pendalaman pada aspek teknis pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, pembentukan tim pendamping teknis di tingkat desa atau kecamatan dapat membantu kepala desa dalam mengatasi kendala praktis di lapangan. Untuk menjangkau lebih banyak kepala desa dan mengatasi kendala geografis, perlu dilakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Materi sosialisasi dapat disampaikan melalui platform daring seperti webinar, modul e-learning, atau aplikasi berbasis mobile. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efisien. Hambatan berupa keterbatasan fasilitas pelatihan, seperti kurangnya perangkat audio-visual, harus segera diatasi. Pemerintah daerah dapat memastikan setiap lokasi sosialisasi dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk mendukung efektivitas penyampaian materi. Selain itu, mempertimbangkan lokasi pelatihan yang strategis dan mudah diakses oleh semua peserta akan meningkatkan kehadiran dan partisipasi kepala desa. Beberapa kepala desa merasa materi terlalu teknis atau sulit dipahami. Oleh karena itu, penyusunan materi sosialisasi perlu mempertimbangkan konteks lokal dan tingkat pendidikan kepala desa. Penggunaan bahasa yang sederhana, disertai studi kasus nyata dan simulasi praktis, dapat membantu peserta memahami dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menghindari konflik dengan agenda lain di tingkat desa, diperlukan perencanaan jadwal sosialisasi yang lebih terkoordinasi. Melibatkan kepala desa dalam menentukan waktu pelaksanaan dapat meningkatkan tingkat kehadiran mereka dan mencegah benturan dengan kegiatan desa lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, tetapi masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan kepala desa dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui program edukasi publik dan penyelenggaraan forum yang inklusif. Hal ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang transparan dan akuntabel. Program sosialisasi harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi dapat diukur, dan kelemahan dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki. Pemerintah daerah dapat mengembangkan indikator keberhasilan yang spesifik untuk mengevaluasi dampak program terhadap tata kelola desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikham, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Bovens, M. (2007). New forms of accountability and EU-governance. *Comparative European Politics*, 5, 104–120.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Harahap, N. M. M. (2024). Collaborative Governance Dalam Revitalisasi Wisata Danau Toba Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 45–55.
- Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–266.
- Heeks, R. (2002). Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations. *The Information Society*, 18(2), 101–112.
- Knowles, M. S. (1980). From pedagogy to andragogy. *Religious Education*, 42–49.
- Margareta, A. S., Sinaga, R. D. F., Hutapea, N. M., & Ivanna, J. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 192–200.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Morgan, G. (1997). *Imaginization: New Mindsets for Seeing, Organizing, and Managing*. ERIC.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan publik, good governance, dan ketahanan nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). Management, eight edition. *Data Status, Belgrade*.
- Setiawan, I. (2024). *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Suaib, M. S. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: sebelas maret university press.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.